

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2014)
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>			
	<i>Catatan</i>	2015	2014
ASET			
Kas dan bank	<i>2b, 3</i>	176.981.194	1.278.849.921
Biaya dibayar dimuka	<i>2c, 4</i>	500.000.000	1.510.000.000
Aset Terikat Untuk Investasi :	<i>2d, 5</i>		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 1.600.925.821 tahun 2015 dan Rp.1.221.761.359 tahun 2014		1.565.183.779	1.850.278.241
JUMLAH ASET		2.242.164.973	4.639.128.162
 <u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u>			
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar		48.000.000	30.000.000
Hutang pajak	<i>6</i>	-	300.000.000
Hutang lain-lain	<i>7</i>	1.038.128.540	1.038.128.540
Jumlah Liabilitas		1.086.128.540	1.368.128.540
ASET NETO	<i>2g</i>		
Tidak Terikat		1.156.036.433	3.270.999.622
Terikat Temporer		-	-
Jumlah Aset Neto		1.156.036.433	3.270.999.622
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		2.242.164.973	4.639.128.162

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN AKTIVITAS
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<i>Catatan</i>	2015		2014		
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Tempore	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT					
Penerimaan					
Kas Negara melalui APBN	2e, 8	1.593.004.644	-	774.317.556	-
Iuran anggota Fraksi Gerindra DPR RI	2e, 9	9.732.000.000	-	3.474.000.000	-
Iuran kontribusi	2e, 10	1.571.000.000	-	59.719.770.500	-
Sumbangan pihak ketiga	2e, 11	-	-	46.456.000.000	-
Sumbangan perorangan	2e, 12	6.889.740	-	5.387.659.984	-
Sumbangan Pengurus	2e, 13	-	-	56.767.202.684	-
Lain-lain	2e, 14	73.214.480	-	84.926.989	-
Jumlah Penerimaan		12.976.108.864	-	172.663.877.713	-
Pengeluaran					
Beban penerimaan kas melalui APBN	2e, 15	1.593.027.042	-	774.321.600	-
Beban kegiatan DPP	2e, 16	362.435.000	-	8.500.800.000	-
Beban program bidang	2e, 17	33.875.000	-	34.200.000	-
Beban kegiatan sayap Partai	2e, 18	52.500.000	-	28.191.500	-
Beban kampanye	2e, 19	-	-	3.525.000.000	-
Beban sumbangan Pemilihan Presiden	2e, 20	-	-	101.769.202.684	-
Beban bakti sosial	2e, 21	33.350.000	-	13.820.000	-
Beban publikasi dan kehumasan	2e, 22	1.382.536.170	-	26.077.478.992	-
Beban umum dan administrasi	2e, 23	11.628.737.841	-	33.093.654.961	-
Beban lain-lain	2e, 24	4.611.000	-	12.492.820	-
Jumlah Pengeluaran		15.091.072.053	-	173.829.162.557	-
PENURUNAN ASET NETO		(2.114.963.189)	-	(1.165.284.844)	-
ASET NETO AWAL TAHUN		3.270.999.622	-	4.436.284.466	-
ASET NETO AKHIR TAHUN		1.156.036.433	-	3.270.999.622	-

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN ARUS KAS
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Dari :			
Kas Negara melalui APBN	<i>2e, 7</i>	1.593.004.644	774.317.556
Iuran anggota DPR RI	<i>2e, 8</i>	9.732.000.000	3.474.000.000
Iuran kontribusi	<i>2e, 9</i>	1.571.000.000	59.719.770.500
Sumbangan pihak ketiga	<i>2e, 10</i>	-	46.456.000.000
Sumbangan perorangan	<i>2e, 11</i>	6.889.740	5.387.659.984
Sumbangan pengurus	<i>2e, 12</i>	-	56.767.202.684
Penerimaan lain-lain	<i>2e, 13</i>	73.214.480	84.926.989
Jumlah		<u>12.976.108.864</u>	<u>172.663.877.713</u>
Pengeluaran kas untuk :			
Beban kegiatan Partai		(14.689.296.591)	(172.583.224.609)
Sewa dibayar dimuka	<i>2c, 4</i>	1.010.000.000	(1.010.000.000)
Hutang pajak		(300.000.000)	-
Beban lain-lain		(4.611.000)	(12.492.820)
Jumlah		<u>(13.983.907.591)</u>	<u>(173.605.717.429)</u>
Kas Neto Yang Digunakan Untuk			
Aktivitas Operasi		<u>(1.007.798.727)</u>	<u>(941.839.716)</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	<i>2d, 5</i>	<u>(94.070.000)</u>	<u>(48.013.600)</u>
Kas Neto Yang Digunakan Untuk			
Aktivitas Investasi		<u>(94.070.000)</u>	<u>(48.013.600)</u>
PENURUNAN NETO KAS DAN BANK		(1.101.868.727)	(989.853.316)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		<u>1.278.849.921</u>	<u>2.268.703.237</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		<u>176.981.194</u>	<u>1.278.849.921</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief,SH Notaris di Jakarta. Akta ini telah mengalami perubahan dengan No. 37 tanggal 16 Mei 2012 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Mejalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

1. UMUM - lanjutan

21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebesar 33 (Tiga puluh tiga) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebesar 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentukan organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
 5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 20 Oktober 2014 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	:	Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Ketua Harian	:	Laksdya TNI (Purn) Moekhlis Sidik, MPA
Wakil Ketua Harian	:	Widjono Hardjanto, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri,	:	Fadli Zon.SS,M.Sc
Ketua Bidang Kajian Sistem Demokrasi	:	Drs. H. Syahrani Mataja, MM., MBA
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik	:	Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketua Bidang Kajian Pemilu	:	Prof Dr Syamsul Bahri
Ketua Bidang Kerjasama Antar Partai Politik	:	Dhohir Farisi
Ketua Bidang Kerjasama Penyelenggara Pemilu	:	Abdul Harris Bobihoe
Ketua Bidang Pemerintahan Umum	:	Dr. H. Azikin Solthan, M.Sc
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintahan	:	Rindoko Dahono Wingit
Ketua Bidang Otonomi Daerah	:	Ir. Endro Hermono, MBA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang Pembangunan Daerah	:	H. Subarna, SE., M.Si
Ketua Bidang Kependudukan	:	Dr. H.A Rasyid Saleh, M.Si
Ketua Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	:	Drs. M. Solihat
Ketua Bidang Pembangunan Desa	:	H. Bambang Riyanto, SH., MH., M.Si
Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	:	H Dairul, SE., M.Si
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	:	Mayjen TNI (Purn) Yudi Magio Yusuf
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	:	Irawan Ronodipuro
Ketua Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional	:	Irmawaty Habie SH
Ketua Bidang Kajian Kerjasama Luar Negeri	:	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian &	:	Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Nusyirwan
Ketua Bidang Pertahanan Darat	:	Kolonel TNI (Purn) Iswandi Anas, M.Si
Ketua Bidang Pertahanan Laut	:	Kolonel TNI (Purn) Sutandyo Sudarsono
Ketua Bidang Pertahanan Udara	:	Marsda TNI (Purn) Suwitno Adi, SIP
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	:	Mayjen TNI (Purn) Soenarko
Ketua Bidang Keamanan Nasional	:	Kombes (Pol) Alfons Loemau
Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/POLRI	:	Drs. Wenny Warouw
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	:	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber	:	Dr. Sumarjati Arjoso
Ketua Bidang Agama Islam	:	Habib Mahdi Alatas
Ketua Bidang Agama Kristen	:	Eliezer H. Hardjo
Ketua Bidang Agama Katolik	:	Haposan Paulus Batubara, SH
Ketua Bidang Agama Budha	:	Gouw Tjeng Sun
Ketua Bidang Agama Hindu	:	Ranjit S. Randhawa
Ketua Bidang Agama Konghucu	:	Sanjaya Sutandar
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	:	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si
Ketua Bidang Riset dan Teknologi	:	Heirma S.Poernomo
Ketua Bidang Teknologi Terapan	:	Fadli Tri Hartono, S.Si
Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknol:	:	Ivan Venri Latif
Ketua Bidang Kesehatan	:	dr. Benyamin Paulus Oktavianus. Sp.P
Ketua Bidang Perbaikan Gizi Masyarakat	:	Bondan Haryo Winarno
Ketua Bidang Keluarga Berencana	:	dr. Batara Sirait, Sp.Og
Ketua Bidang Sosial	:	Yetti Wulandari
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	A.S.Kobalen,SE., MBA.,M.Phil
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan P:	:	Anita Ariyani
Ketua Bidang Advokasi Perempuan	:	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Ketua Bidang Perlindungan Anak	:	dr. Karlina, MARS
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan K:	:	Retno Sari Widowati
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	:	H. Anda, SE., MM
Ketua Bidang Kesenian dan Film Nasional	:	Jamal Mirdad
Ketua Bidang Budaya Nasional	:	Helmi Adam, S.Sos., S.Pd
Ketua Bidang Penanggulangan Penyalahgunaan	:	Sabam Rajagukguk
Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerj:	:	Fx. Arief Poyuono, SE

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan : Roberth Rouw

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan	:	Ir. Iwan Sumule
Ketua Bidang Pengawasan Buruh dan Ketenagakerjaan	:	Idin Rosidin
Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	:	Hairudin, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Keuangan dan	:	Murphy Hutagalung, MBA
Ketua Bidang Perdagangan	:	Heri Gunawan
Ketua Bidang BUMN	:	H. Nurzahedy Tanjung, SE
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal	:	Budisatrio Djiwandono
Ketua Bidang Penerimaan Negara	:	Ramson Siagian
Ketua Bidang Keuangan	:	Haerul Saleh, SH
Ketua Bidang Perbankan	:	Drs. H. Mulyadi, MMA
Ketua Bidang Perindustrian	:	Mohamad Hekal, MBA
Ketua Bidang Ekspor dan Impor	:	Khilmi
Ketua Bidang Kajian Ekonomi Internasional	:	Eric Alexander Sugandi
Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan,	:	Edhy Prabowo, MM., MBA
Ketua Bidang Perencanaan, Pengawasan dan	:	Ir. Sumail Abdullah
Ketua Bidang Tata Ruang Wilayah	:	Budi Tjahjono Prawiro
Ketua Bidang Pertanahan	:	H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE
Ketua Bidang Perumahan Rakyat	:	H. Moh. Nizar Zahro, SH
Ketua Bidang Pekerjaan Umum	:	Sudarsono, ST
Ketua Bidang Perhubungan	:	Arion Hutagalung
Ketua Bidang Pertanian	:	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
Ketua Bidang Peternakan	:	drh. Muchlido Apriliast
Ketua Bidang Kehutanan	:	Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, MM
Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan	:	Ir. Suminta Ismail
Ketua Bidang Perdagangan Agro Internasional	:	Dr. Ir. Sunggul Sinaga
Ketua Bidang Pertambangan	:	Meireza Endipat Wijaya, ST
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan I	:	Dr. Ir. Kardaya Warnika, DEA
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan II	:	Ir. H. Harry Poernomo
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Konservasi Energi	:	Dian Nugroho, ST
Ketua Bidang Pariwisata	:	drg. Putih Sari
Ketua Bidang Transmigrasi	:	Eddy DJ. Wibowo, SH
Ketua Bidang Lingkungan Hidup	:	Benny Gusman Sinaga, ST
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	:	Waskita Rini
Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah	:	Fary Djemy Francis
Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi, UMKM dan	:	Marwah Daud Ibrahim, Ph.D
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM	:	Syukrianto Yulia, M.Fin
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan	:	Feryzal Adam, SE., MM
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	:	Jasmin B Setiawan
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan	:	Widjono Hardjanto, SH
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	:	Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi	:	Rohmat Marzuki
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi	:	Sudewa, ST., MT
Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi	:	Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Le : Abdul Rahman
Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai : Fauka Noor Farid

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa	:	Ferry Joko Yuliantono, SE., AK., M.Si
Ketua Bidang Pemetaan Potensi Basis Pemilih	:	Setyoko, ST
Ketua Bidang Penggalangan Massa	:	Didik Hariyanto
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	:	M. Asrian Mirza
Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi	:	Rahmawati Soekarno Putri
Ketua Bidang Pengkajian Ideologi	:	Eko Suryo Santjojo, B.B.A, SH., MH
Ketua Bidang Pembinaan Ideologi	:	Ir. Ristiyanto
Ketua Bidang Pengamalan Ideologi	:	Bambang Suroso, SH., MH
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi	:	Dr. H. Sareh Wiyono, SH., MH
Ketua Bidang Ideologi Pancasila	:	J. Priyo Harmono, SE., MH, M.Sc
Ketua Bidang Wawasan Nusantara	:	Priscilla E Mantiri
Ketua Bidang Manifesto Perjuangan Partai	:	Kolonel TNI (Purn) Suhary Z.B
Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi:	:	Sugiono
Ketua Bidang Kaderisasi	:	Eko Wibowo
Ketua Bidang Sekolah Kader	:	Kharisma Febriansyah
Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi:	:	Benny Pangbin
Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	:	Hj. Novita Wijayanti, SE., MM
Ketua Bidang Informasi Strategis	:	Danang Wicaksana Sulistya
Ketua Bidang Komunikasi	:	Ondy Saputra
Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik	:	Dirgayuza Setyawan
Ketua Bidang Pengelolaan Database Partai	:	Moh Arif Widarto
Ketua Bidang Upacara dan Tradisi Partai	:	Chusni Mubarak
Ketua Bidang Logistik Partai	:	Adnani Taufiq, S.Sos
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	:	Ir. Sufmi Dasko Ahmad, SH.,MH
Ketua Bidang Kajian Hukum	:	Johan J. Lewerissa, SH., MH
Ketua Bidang Hak Asasi Manusia	:	Hj. Mestariy Habie, SH
Ketua Bidang Advokasi	:	Habiburokhman, SH
Ketua Bidang Hukum Perdagangan	:	Maralda Hernanda Kairupan, SH., LL.M., MCI Arb
Ketua Bidang Hukum Konstitusi	:	Dr. Hj. Elza Syarief, SH., MH
Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa	:	Andi Seto Gadysta Asapa, SH., LL.M
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga	:	Purnomo
Ketua Bidang Kepemudaan	:	Ikhwan Amirudin, SE., MM
Ketua Bidang Olahraga	:	Abdul Karim Aljufri
Sekretaris Jenderal	:	H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum	:	Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

(ORGANISASI NIRLABA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding Tahun 2014

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Fungsi dan Tugas

Fungsi :

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Partai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

c. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Kendaraan	8	12,5
Peralatan kantor	4	25
Perlengkapan kantor	4	25

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

e. Aset Neto

Aset bersih digolongkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen, tergantung ada tidaknya pembatasan. Partai menyajikan hibah atau wakaf berupa kas dan aset lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah berlalu, yaitu pada saat pembatasan masa telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

f. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

g. Perubahan Aset Neto

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu :

- Pembatasan Permanen

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- Pembatasan Temporer

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhi keadaan tertentu.

- Sumbangan Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

- Sumbangan Tidak Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kas	46.853.747	192.397.339
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-621-8328)	68.904.442	101.769.894
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-488-6712)	19.692.973	83.937.418
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-002-6263)	8.651.978	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-664-9217)	8.172.939	136.874.220
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-695-5291)	1.166.000	-
PT Bank Central Asia Tbk. (a/c 2063-00-5959)	18.291.866	221.734.179
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(a/c 02-0601-003-052-303)	5.247.249	542.136.871

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah

176.981.194

1.278.849.921

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sewa gedung	500.000.000	1.500.000.000
Uang muka pembelian kendaraan	-	10.000.000
Jumlah	<u>500.000.000</u>	<u>1.510.000.000</u>

Sewa Gedung :

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa gedung di Jalan Harsono RM, No. 54 Ragunan Jakarta Selatan yang digunakan untuk kegiatan operasional Dewan Pimpinan Partai (DPP Gerindra)

Jangka waktu sewa selama 24 (dua puluh empat) bulan dari bulan Juni 2014 sampai dengan Juni 2016, dengan sewa sebesar Rp. 2.000.000.000 dan saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 dan Rp. 1.500.000.000 (*lihat catatan 23*).

5. ASET TETAP

Terdiri dari :

	31 Desember 2015			
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	2.752.950.000	-	-	2.752.950.000
Peralatan kantor	190.513.000	88.070.000	-	278.583.000
Perlengkapan kantor	128.576.600	6.000.000	-	134.576.600
Jumlah	<u>3.072.039.600</u>	<u>94.070.000</u>	<u>-</u>	<u>3.166.109.600</u>
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	925.655.729	344.118.750		1.269.774.479
Peralatan kantor	171.553.792	31.135.750		202.689.542
Perlengkapan kantor	124.551.838	3.909.962	-	128.461.800
Jumlah	<u>1.221.761.359</u>	<u>379.164.462</u>	<u>-</u>	<u>1.600.925.821</u>
Nilai Buku	<u>1.850.278.241</u>			<u>1.565.183.779</u>

	31 Desember 2014			
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	2.725.000.000	27.950.000		2.752.950.000
Peralatan kantor	172.359.000	18.154.000		190.513.000

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perlengkapan kantor	126.667.000	1.909.600	-	128.576.600
Jumlah	3.024.026.000	48.013.600	-	3.072.039.600
5. ASET TETAP - lanjutan				
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	584.739.583	340.916.146		925.655.729
Peralatan kantor	161.854.500	9.699.292		171.553.792
Perlengkapan kantor	121.497.688	3.054.150	-	124.551.838
Jumlah	868.091.771	353.669.588	-	1.221.761.359
Nilai Buku	2.155.934.229			1.850.278.241

Biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan perubahan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 379.164.462 dan Rp. 353.669.588.

6. HUTANG PAJAK

Akun ini merupakan hutang pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 300.000.000 dan untuk tahun 2015 nihil.

7. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan hutang partai pada PT Citosarana Jasapratama atas biaya pengiriman Tabloid Gema Indonesia Raya Partai Gerindra untuk tingkat DPD dan DPC di seluruh cabang Indonesia, dengan saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 1.038.128.540.

8. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	2015	2014
Pemilu 2014/2019	1.593.004.644	398.251.161
Pemilu 2009/2014	-	376.066.395
Jumlah	1.593.004.644	774.317.556

Pemilu 2014/2019

Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2015 dan 2014 kepada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya masing-masing sebesar Rp. 1.593.004.644 dan Rp. 398.251.161. Bantuan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diterima sebanyak 14.750.043 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga) suara dengan nilai satu suara sebesar Rp. 108.

Atas total suara tersebut DPP Partai Gerindra akan menerima bantuan sebesar Rp. 1.593.004.644. Dana bantuan yang sudah diterima oleh DPP Gerindra tahun 2014 sebesar Rp. 398.251.161 untuk bulan Oktober - Desember 2014.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemilu 2009/2014

Berdasarkan hasil Pemilu 2009/2014 Partai Gerakan Indonesia Raya mendapatkan suara rakyat sebanyak 4.642.795 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara dengan nilai satu suara sebesar Rp. 108.

8. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN - lanjutan

Dana bantuan yang diterima pada tahun 2014 untuk bulan Januari - September (sembilan bulan) sebesar Rp. 376.066.395, dikarenakan ditahun 2014 dilaksanakan Pemilu untuk periode 2014/2019.

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. Pendidikan Politik

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

2. Operasional Sekretariat

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang seusai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :

- a. Adiministrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

9. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Iuran anggota periode 2014/2019	9.732.000.000	1.692.000.000
Iuran anggota periode 2009/2014	-	1.782.000.000
Jumlah	<u>9.732.000.000</u>	<u>3.474.000.000</u>

Iuran anggota periode 2014/2019

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2014/2019, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 73 kursi atau sekitar 13,04% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp. 12.000.000 perbulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 9.732.000.000

dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.692.000.000 untuk periode bulan November - Desember 2014 dari 73 orang anggota.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Iuran anggota periode 2009/2014

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.782.000.000.

Sumbangan diterima partai dari 26 orang anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana satu anggota menyumbang berkisar antar sebesar Rp. 7.000.000 sampai dengan Rp. 7.900.000 per bulan.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. IURAN KONTRIBUSI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Iuran Anggota Dewan	499.000.000	12.863.000.000
Iuran Pilpres	<u>1.072.000.000</u>	<u>46.856.770.500</u>
Jumlah	<u><u>1.571.000.000</u></u>	<u><u>59.719.770.500</u></u>

Iuran Anggota Dewan

Akun ini merupakan dana iuran yang diterima DPP Gerindra dari Pimpinan dan Wakil tingkat Propinsi, Kota dan Kabupaten. Dana ini digunakan untuk biaya operasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) juga untuk biaya kampanye Pemilu 2014/2019. Berikut rincian iurannya :

Wakil Ketua Propinsi	100.000.000
Ketua Fraksi Propinsi	50.000.000
Ketua Kabupaten/Kota	75.000.000
Wakil Ketua Kabupaten/Kota	50.000.000
Ketua Fraksi Kabupaten/Kota	10.000.000

Jumlah anggota Pimpinan dan Wakil tingkat Propinsi, Kota dan Kabupaten sebanyak 534 anggota, saldo iuran anggota Fraksi yang diterima untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 499.000.000 dan Rp. 12.863.000.000.

Iuran Pilpres

Akun ini merupakan dana yang diterima DPP Gerindra dari calon Legislatif yang lolos di kursi Perwakilan Rakyat Periode 2014/2019 untuk tingkat DPR-RI, DPRD-1 dan DPRD-2 dan dananya digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres). Berikut rincian iuran Pilpres per anggota :

Anggota DPR-RI	150.000.000
Anggota Dewan Propinsi	50.000.000
Anggota Dewan Kabupaten/Kota	25.000.000

Jumlah anggota DPR-RI, Dewan Propinsi dan Dewan Kabupaten/Kota sebanyak 2.085, saldo iuran Pilpres yang diterima untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 1.072.000.000 dan Rp. Rp. 46.856.770.500.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan sumbangan dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PT Cakrawala Sukses Persada	-	7.500.000.000
PT Mandiri Cakrawala Sukses	-	7.500.000.000
PT Mandiri Tangguh Perkasa	-	7.500.000.000
PT Garda Sakti Persada	-	7.500.000.000
PT Artha Nugrah Jasantana	-	7.500.000.000
PT Sukses Cakrawala Mulia	-	7.500.000.000
PT Arsari Pratama	-	1.456.000.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>46.456.000.000</u>

PT Arsari Pratama

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Arsari Pratama dan dana ini digunakan untuk kegiatan operasional Partai dan pembayaran sewa gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional Partai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran dan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

12. SUMBANGAN PERORANGAN

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari perorangan yang digunakan untuk biaya operasional Partai dan biaya pelaksanaan kampanye partai periode 2014/2019, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 6.889.740 (Enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Rp. 5.387.659.984 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran.

13. SUMBANGAN PENGURUS

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari Pengurus Partai yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilu 2014/2019 dan biaya operasional Partai pada tahun 2014 sebesar Rp. 56.767.202.684 (Lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam puluh delapan empat rupiah).

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENERIMAAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan penerimaan jasa giro dan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 73.214.479 (Tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu empat puluh tujuh sembilan rupiah) dan Rp. 84.926.990 (Delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

15. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Pelatihan Kaderisasi Partai Gerindra	997.248.700	496.639.981
Listrik dan telepon	370.051.617	181.089.054
Jasa pos dan giro	141.877.900	3.375.740
Beban rumah tangga	36.368.892	16.959.000
Beban rapat internal Pengurus	27.917.251	35.162.742
Alat tulis kantor	9.074.310	22.678.860
Beban pemeliharaan data dan arsip	5.500.000	10.443.450
Beban transportasi dan perjalanan dinas	4.988.372	7.972.773
Jumlah	<u>1.593.027.042</u>	<u>774.321.600</u>

Pelatihan Kaderisasi Partai Gerindra

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Tunas Indonesia Raya (Tidar), untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 997.248.700 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp. 496.639.981 (Empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

16. BEBAN KEGIATAN DPP

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Beban Kongres Luar Biasa	362.435.000	5.500.000.000
Beban Peringatan Hari Nasional	-	2.806.300.000
Beban Rapat Koordinasi DPP-DPC	-	194.500.000
Jumlah	<u>362.435.000</u>	<u>8.500.800.000</u>

Beban Kongres Luar Biasa

Merupakan beban atas pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 September 2014 di Nusantara Polo Club, Bogor.

Beban Peringatan Hari Nasional

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan biaya atas pelaksanaan Upacara 17 Agustus 1945 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Nuasantara Polo Club, Bogor.

16. BEBAN KEGIATAN DPP - lanjutan

Beban Rapat Koordinasi DPP-DPC

Merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan rapat koordinasi DPP-DPC Partai Gerindra yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 18 Agustus 2014 di Gedung DPP Partai Gerindra yang membahas mengenai calon pimpinan DPRD.

17. BEBAN PROGRAM BIDANG

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bidang politik, hukum dan keamanan	20.500.000	-
Biaya operasional bidang kesehatan	13.375.000	34.200.000
Pelatihan Kaderisasi Partai Gerindra	-	-
Jumlah	<u>33.875.000</u>	<u>34.200.000</u>

18. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Perempuan Indonesia Raya (PIRA)	52.500.000	28.191.500
Jumlah	<u>52.500.000</u>	<u>28.191.500</u>

19. BEBAN KAMPANYE

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye Partai Gerindra pada Pemilu 2014/2019, dimana atas kampanye ini Partai Gerindra mendapatkan suara rakyat sebanyak 14.750.043 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga) suara sebesar Rp. 3.525.000.000 untuk (Tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tahun yang berakhir per 31 Desember 2014.

Sumber dana kampanye sebagian besar diterima dari sumbangan pihak ketiga dan iuran kontribusi Pimpinan Farksi (Pimpinan dan Wakil Propinsi, Kota dan Kabupaten)

20. BEBAN SUMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014/2019 dengan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebesar Rp. 101.769.202.684 (Seratus satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam puluh delapan empat rupiah) untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Sumber dana kampanye sebagian besar dari iuran kontribusi dari calon Legislatif yang lolos di kursi Perwakilan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rakyat Periode Pemilu 2014/2019 untuk tingkat DPR-RI, DPRD-1 dan DPRD-2 dan sumbangan dari Pengurus Partai.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN BAKTI SOSIAL

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sumbangan masyarakat	23.350.000	13.820.000
Sumbangan bencana alam	10.000.000	-
Jumlah	<u>33.350.000</u>	<u>13.820.000</u>

22. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Atribut partai	1.128.951.170	20.671.513.000
Domain dan website	189.700.000	210.290.000
Media center dan team online	50.000.000	767.000.000
Hukum dan Advokasi Partai	10.000.000	956.500.000
Langganan majalah dan koran	3.885.000	4.895.000
Iklan media cetak & massa	-	3.464.880.992
Cetak majalah dan tabloid	-	2.400.000
Jumlah	<u>1.382.536.170</u>	<u>26.077.478.992</u>

Atribut partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

Iklan media cetak & massa

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa.

Hukun dan Advokasi Partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan hukum, baik menjelang maupun setelah kampanye Partai dan kampanye Pemilihan Presiden.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dengan Angka Pembanding Tahun 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Beban operasional	6.241.488.598	22.093.000.000
Gaji dan tunjangan	2.099.707.105	738.275.825
Beban sewa gedung	1.000.000.000	1.000.000.000
Beban transportasi dan perjalanan dinas	759.019.200	1.026.068.633
Beban penyusutan aset tetap	379.164.462	353.669.588
Beban pemeliharaan	190.764.997	683.410.237
Beban pajak	154.615.296	4.658.436
Listrik, telepon dan internet	145.108.718	334.910.406
Beban jamuan	112.319.896	302.020.105
Alat tulis kantor	109.494.080	67.365.475
Beban konsumsi	104.025.000	147.027.150
Biaya pengiriman barang	78.357.600	4.998.085.580
Beban jasa keamanan dan kebersihan	36.580.000	12.650.000
Beban jasa profesional	33.000.000	30.000.000
Beban inventaris dan instalasi kantor	27.104.104	112.978.163
Beban rapat internal Pengurus	7.843.481	20.037.719
Perizinan, Hukum dan Advokasi	4.600.000	559.927.000
Biaya operasional Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BAPPNAS)	-	208.100.000
Seragam karyawan dan pengurus	-	65.385.000
Beban rumah tangga		57.020.386
Lain-lain	145.545.304	279.065.258
Jumlah	<u>11.628.737.841</u>	<u>33.093.654.961</u>

Sewa Gedung

Akun ini merupakan biaya sewa gedung yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, gedung digunakan untuk kegiatan operasional Partai dengan saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (*lihat catatan 4*).

24. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 4.611.000 (Empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dan Rp. 12.492.820 (Dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

25. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang diselesaikan pada tanggal .